

BAB III

PERMASALAHAN PERUSAHAAN

3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi oleh Perusahaan

PT. MPX Logistics International merupakan perusahaan yang bergerak disektor jasa yang membantu proses pengiriman material ke berbagai daerah diseluruh Indonesia. Sebagai organisasi komersial untuk dapat bertahan serta memiliki kelangsungan usaha, maka perusahaan harus memperoleh laba. Untuk mencapai tujuan tersebut, PT. MPX Logistics International mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawannya melalui penerapan tata kelola perusahaan serta penetapan standar operasional prosedur (SOP) sehingga kegiatan perusahaan terlaksana dengan lancar dan terstruktur.

Upaya yang dilakukan perusahaan guna memastikan karyawan telah melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku diperusahaan adalah melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal. Sebagai bentuk pengendalian terhadap keuangan perusahaan, PT. MPX Logistics International melaksanakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening bank. Setiap akhir bulan PT. MPX Logistics International melakukan pencocokan antara saldo kas menurut pencatatan perusahaan dengan saldo menurut pencatatan bank melalui rekening koran. Akan tetapi dalam prakteknya, PT. MPX Logistics International belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal terhadap kas dengan baik, dikarenakan masih terdapat unsur-unsur yang belum berjalan.

Unsur tersebut diantaranya meliputi rangkap tugas dan tanggung jawab dalam proses otorisasi dan pencatatan terkait transaksi pengeluaran kas serta ketidaklengkapan bukti fisik dari pengeluaran tersebut. Kas dengan sifatnya yang sangat likuid dapat dengan mudah dimanipulasi, sehingga kelonggaran dalam sistem pengendalian kas menjadi celah dalam tindak kecurangan dan penggelapan. Penerapan sistem pengendalian internal yang tepat dan menyeluruh dalam proses operasional perusahaan disemua level dan unit kerja dalam perusahaan sangat penting guna menghindari terjadinya penyimpangan dan *error*.

3.1.1 Temuan Masalah

Atas dasar analisa diatas, temuan masalah yang terjadi pada PT. MPX Logistics International adalah terkait dengan sistem pengendalian internal perusahaan terhadap kas yang belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemisahan tanggung jawab yang tegas antara fungsi otorisasi dan pencatatan dalam transaksi pengeluaran kas. Selain itu, terdapat transaksi pengeluaran kas yang terjadi dalam jumlah kecil maupun besar yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen dasar dan dokumen pendukung berupa tagihan atas transaksi pengeluaran tersebut. Lemahnya sistem pengendalian internal terhadap kas mengakibatkan timbulnya risiko finansial dan likuiditas karena munculnya celah untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi perusahaan serta pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh pemegang saham karena ketidakandalan pelaporan keuangan.

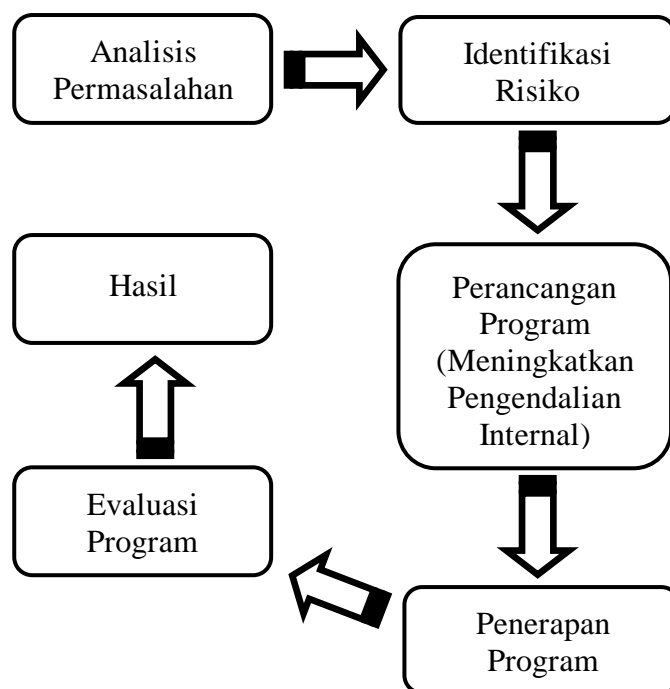
3.1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan temuan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pengendalian internal yang baik untuk mewujudkan praktek yang sehat dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab terkait penerimaan dan pengeluaran kas?
2. Apa saja ketentuan dan prosedur yang perlu diterapkan di PT. MPX Logistics International sebagai bentuk pengendalian terhadap pengeluaran kas?

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah pada PT. MPX Logistics International adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Saat ini sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam aktivitas untuk mencapai tujuannya. Menurut Rama dan Jonse (2008:6) sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi.

3.2.2 Pengendalian Internal

3.2.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Menurut Tuanakotta (2013), pengendalian internal dirancang, diimplementasikan dan dipelihara oleh pemilik perusahaan, manajemen dan karyawan untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Sehingga pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan keandalan dari suatu laporan keuangan. Pengendalian internal menjadi semacam dorongan yang diberikan kepada seseorang atau karyawan dari bagian tertentu dari organisasi atau organisasi secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan (COSO dalam Susanto, 2008).

3.2.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Sistem pengendalian yang baik harus dapat memenuhi tujuan pembuatannya dan menangkal risiko kecurangan. Secara garis besar, tujuan pengendalian internal dibagi ke dalam empat kelompok (Tuanakotta, 2013) diantaranya:

1. Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas.
2. Pengendalian internal atas pelaporan keuangan.
3. Pengendalian operasional.
4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

3.2.2.3 Komponen dan Prinsip Pengendalian Internal

(Boynton, 2006:412) unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas (struktur organisasi)

Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip yang harus dipisahkan yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberikan tanggung jawab penuh dalam melaksanakan semua transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan sistem otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.
- b. Semua fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih jabatan dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan asset perusahaan.

3. Praktek yang sehat

Cara-cara yang umumnya digunakan perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut yang bercetak, pemeriksaan mendadak, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan oleh satu orang atau satu bagian tanpa campur tangan bagian lain dari awal sampai akhir perputaran jabatan, keharusan pengambilan cuti, pencocokan kekayaan dengan catatannya secara periodik dan pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur sistem pengendalian intern yang lain.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien. Hal ini akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan karena pemilihan karyawan yang mempunyai integritas dan kemampuan yang memadai dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam hal biaya dan manfaat. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berikut cara-cara yang baik untuk digunakan:

- a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan

yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipilihnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.

- b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

COSO (*Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) menyebutkan adanya 5 (lima) komponen yang terdiri dari 17 (tujuh belas) prinsip pengendalian internal, seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

No.	Komponen	Prinsip
1.	Lingkungan Pengendalian	a) Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. b) Komitmen terhadap kompetensi. c) Independensi dewan komisaris terhadap direksi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. d) Struktur, jalur, pelaporan penetapan, wewenang dan tanggung jawab yang tepat. e) Penetapan akuntabilitas yang jelas bagi setiap individu
2.	Penilaian Risiko	a) Penjabaran tujuan organisasi (perusahaan) secara spesifik sehingga identifikasi dan penilaian risiko dapat dikaitkan dengannya. b) Pengidentifikasian risiko dikaitkan dengan tujuan organisasi untuk semua bagian (kegiatan) perusahaan. c) Penilaian (<i>assesment</i>) terhadap risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kecurangan. d) Pengidentifikasian dan penilaian terhadap perubahan risiko yang berpengaruh terhadap pengendalian internal.
3.	Kegiatan Pengendalian	a) Pengendalian harus dapat memitigasi risiko perusahaan ke tingkat yang dapat diterima. b) Pengendalian umum (<i>general controls</i>) terhadap teknologi perlu dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan.

		c) Pengendalian mencakup kebijakan dan prosedur.
4.	Informasi dan Komunikasi	<p>a) Penggunaan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.</p> <p>b) Mengomunikasikan informasi kepada pihak eksternal untuk mendukung berfungsinya pengendalian internal.</p> <p>c) Mengomunikasikan informasi kepada pihak eksternal tentang hal-hal yang yang berpengaruh terhadap berfungsinya pengendalian internal.</p>
5.	Kegiatan Monitoring	<p>a) Penilaian terhadap berfungsinya pengendalian internal dilakukan secara terus menerus (<i>on going</i>) atau secara terpisah (<i>separate</i>).</p> <p>b) Mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal dilakukan pada waktu yang tepat kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap tindakan koreksi, termasuk direksi, manajemen senior dan dewan komisaris, jika diperlukan.</p>

Tabel 3.1 5 Komponen dan 17 Prinsip Pengendalian Internal COSO

3.2.2.4 Jenis Pengendalian Internal

Menurut jenisnya, pengendalian internal dapat dikelompokkan kedalam lima bagian (Karyono, 2013:50), yaitu:

1. Pengendalian preventif adalah pengendalian yang dilakukan sebagai antisipasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti: pemisahan fungsi (*segregation of duties*).
2. Pengendalian detektif adalah pengendalian yang memfokuskan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin terjadi. Seperti: rekonsiliasi bank, perhitungan fisik kas
3. Pengendalian korektif sebagai upaya untuk mengkoreksi penyebab terjadinya masalah dan sebagai antisipasi agar kesalahan yang sama tidak berulang di masa yang akan datang.

4. Pengendalian langsung adalah pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti: supervisi oleh atasan kepada bawahan.
5. Pengendalian kompensatif merupakan upaya perkuatan pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian.

3.2.3 Kas

3.2.3.1 Pengertian Kas

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan membutuhkan alat tukar sebagai bentuk penyelesaian transaksinya yang berlaku secara resmi dinegara tempat perusahaan beroperasi. Alat tukar yang pada umumnya digunakan dalam bertransaksi adalah kas. Dalam laporan posisi keuangan, kas menjadi aset yang bersifat paling likuid diantaranya yang lainnya. Kas berperan sebagai dasar pengukuran dan pencatatan dalam transaksi keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007:2): kas terdiri dari saldo kas (Cash On Hand) dan rekening giro setara dengan kas adalah yang sifatnya likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai signifikan. Kas adalah uang yang tersedia untuk usaha sekarang, yang terdiri dari uang kontan, cek, *money order*, post wesel. kas dalam bentuk rekening giro dapat digunakan bank (Pirmatua Sirait, 2011:20).

Menurut Jhon (2007 : 2) motif kepemilikan kas dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Motif Transaksi

Kas yang memadai harus selalu tersedia untuk membeli persediaan, membayar hutang, biaya, gaji, deviden, dan sebagainya.

2. Motif spekulatif

Kas seperti ini disimpan untuk sewaktu-waktu, misalnya membeli saham perusahaan lain yang bangkrut, membeli persediaan dengan harga yang lebih murah, mengambil alih (*take over*) perusahaan lain dan sebagainya.

3. Motif berjaga-jaga

Motif berjaga-jaga ini memberikan jaminan terhadap kenyataan bahwa kita mengetahui atau menyadari bahwa kondisi dimasa mendatang sulit diduga atau tidak pasti.

3.2.3.2 Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas

Sistem penerimaan kas adalah suatu jaringan prosedur yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan khususnya transaksi penerimaan kas (Nungroho A Widjajaanto, 2001:95). Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang (Mulyadi, 2008:454). Penjualan tunai terjadi dengan syarat mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu dan setelah uang diterima oleh perusahaan maka barang dapat diserahkan kepada pembeli kemudian transaksi penjualan tunai tersebut dicatat oleh perusahaan.

Mengingat kas bersifat paling lancar dibandingkan dengan aktiva lainnya, maka untuk melindungi penerimaan kas ini diperlukan sebuah sistem pengendalian

intern yang sangat baik. Unsur-unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, diantaranya :

1. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas.
2. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi.
3. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi.
4. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai.
5. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap “lunas” pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut.
6. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit.
7. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur penjualan tunai.
8. Pencatatan kedalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai.
9. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan.
10. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya.
11. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa intern (Mulyadi 2008:470).

3.2.3.3 Sistem Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas

Menurut Mulyadi (2008:509) Pengeluaran kas dalam perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan cek, pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlahnya yang relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas adalah formulir, catatan dan laporan yang disediakan untuk menangani transaksi pengeluaran kas berkaitan dengan akuisisi untuk pembayaran barang ataupun jasa.

Pada dasarnya, pengendalian intern atas pengeluaran kas akan lebih efektif ketika pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau transfer melalui rekening bank, dibandingkan menerima uang kas secara langsung. Pengecualian tersebut untuk pengeluaran-pengeluaran tertentu dengan jumlah relatif kecil yang dapat dibayar melalui dana kas kecil. Dalam suatu perusahaan anggaran biaya berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa kas telah digunakan secara efisien. Adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab pada setiap fungsi dalam organisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Selain itu, dokumen tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel “lunas” untuk menghindari terjadinya pembayaran kembali.

Secara garis besar, berikut beberapa penerapan prinsip pengendalian internal atas pembayaran kas dengan menggunakan cek diantaranya :

1. Hanya pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otoritas untuk menandatangani cek (biasanya manager keuangan).

2. Adanya pemisahan tugas antara individu yang menyetujui pengeluaran kas, dan yang mencatat/membukukan pengeluaran kas.
3. Menggunakan cek yang telah bernomor urut tercetak, setiap cek harus dilampiri dengan bukti tagihan.
4. Simpanlah blanko cek yang belum terpakai (yang telah bernomor urut tadi).
5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal. Bandingkan cek dengan bukti tagihan dan dicocokkan dengan laporan bank atau rekening koran.
6. Faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel “Lunas”

3.2.3.4 Pengendalian Intern Sebagai Pendeteksi Kecurangan

Untuk dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya kekeliruan dan penyimpangan dalam perusahaan, maka pengendalian internal perlu dirancang secara sistematis. Menurut Karyono (2013) terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan, diantaranya yaitu :

1. Deteksi kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat

Deteksi kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, diantaranya:

- a. Melakukan analisis perkiraan persediaan, penjualan, dan penerimaan kas untuk mendeteksi adanya kecurangan penerimaan uang hasil penjualan.
- b. Melakukan verifikasi permintaan barang, pengiriman barang, catatan persediaan dan analisis *trend* untuk mendeteksi persediaan dikaitkan dengan penjualan dan penerimaan uangnya.

- c. Melakukan pengujian penguangan cek untuk mendeteksi kecurangan pengambilan cek dari pelanggan.
 - d. Melakukan pengkajian ulang terhadap penjurnalan kas dan perkiraan persediaan untuk mendeteksi kecurangan penerimaan uang hasil penjualan.
2. Deteksi kecurangan penerimaan kas yang sudah dicatat di pembukuan
- Tindakan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan penerimaan kas, diantaranya:
- a. Melakukan pengendalian hubungan antara penjualan, harga pokok penjualan, retur penjualan dan diskon penjualan.
 - b. Melakukan kaji ulang atas pengendalian penerimaan uang, kelengkapan dokumen, keabsahan, pencatatan, keamanan fisik.
 - c. Melakukan kaji ulang atas penerimaan uang meliputi registrasi, pencatatannya dan pengamanan uangnya.
3. Deteksi kecurangan pengeluaran kas
- Kecurangan pengeluaran kas dilakukan dengan pola: mengubah cek, penyimpanan tagihan, dan biaya. Pendeteksian kecurangan pengeluaran kas dapat dilakukan dengan tindakan berikut ini:
- a. Pola mengubah cek
Melakukan *cut off*, atas rekening bank untuk mendeteksi penyimpanan kas di bank, melakukan rekonsiliasi bank, mengidentifikasi adanya pemalsuan cek.
 - b. Pola penyimpanan tagihan

Melakukan kaji ulang, atas transaksi tidak normal dengan membandingkan pembelian dan penjualan tahun berjalan dengan tahun lalu, identifikasi adanya pengaduan dari pemasok atau pihak ketiga.

c. Pola biaya

Melakukan analisis perbandingan biaya sekarang dan tahun lalu, melakukan kaji ulang atas penggantian biaya.

3.3 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan hasil kerja praktek ini antara lain:

1. Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan observasi ataupun wawancara.
2. Metode kepustakaan (*library research*) didefinisikan sebagai cara memperoleh data melalui proses pembelajaran, pengkajian dan penelaahan literatur yang berhubungan dengan konteks pembahasan yang dapat berbentuk buku, jurnal maupun makalah.

3.4 Rancangan Program yang akan Dilakukan

Rancangan program yang akan dilakukan untuk memberikan solusi terkait masalah yang telah teridentifikasi pada PT. MPX Logistics International adalah sebagai berikut :

1. Menyarankan adanya peningkatan terhadap penerapan sistem pengendalian internal perusahaan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam hal koreksi yang terjadi di perusahaan, dikarenakan terjadinya kelonggaran dalam

pengendalian intern atas kas dengan menegaskan pemisahan tanggung jawab antara fungsi otorisasi dan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran kas serta menetapkan sistem dan prosedur dalam transaksi pengeluaran kas untuk menghindari terjadinya penggelapan, penyimpangan dan kesalahan berulang terhadap kas.

2. Membantu penerapan, proses monitoring dan evaluasi secara berkala pada divisi-divisi terkait untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan secara berulang.